

PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENURUNAN ANGKA PREVALENSI STUNTING DI KOTA SEMARANG

Ferita Nur Alifisyiam, Augustin Rina Herawati, Hartuti Purnaweni

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The success of Semarang City in reducing the stunting prevalence rate by 10.4% in 2022 cannot be separated from the involvement of stakeholders who played a role. This achievement was better than the national target (14%) and was the lowest stunting prevalence rate in Central Java. The aim of this research is to identify stakeholders who are involved and analyze their role in reducing the prevalence of stunting in Semarang City. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and literature study. This research uses Maryono et.al's theory to identify stakeholder and Bryson's theory for analyzing roles stakeholders which are involved. The results of this research show that stakeholders Those involved in successfully reducing stunting prevalence rates in Semarang City were identified into three categories, namely (1) primary stakeholder (target communities, posyandu and puskesmas); (2) secondary stakeholder consisting of private parties; and (3) key stakeholder (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, and Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang). Meanwhile, the role of stakeholders is divided into four types, namely key players, context setters, subjects, and crowd. The recommendations given in this research are (1) the Semarang City Government needs to apply the concept of community empowerment in handling stunting in order to increase community independence; and (2) the cross-sector program innovations owned by the Semarang City Government can be applied to other regional governments as a pilot project in reducing stunting prevalence rates.

Keywords: *role, stakeholders, stunting*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, permasalahan publik yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks sehingga penanganannya memerlukan perhatian dari pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sudut pandang administrasi publik, apabila terjadi permasalahan publik di Indonesia maka pemerintah harus bertindak sebagai

regulator yang berperan untuk mengatur dan mengambil langkah atas permasalahan yang timbul melalui pemberian pelayanan publik kepada masyarakat (Keban, 2014).

Salah satu dimensi dalam administrasi publik adalah dimensi manajemen. Ghofur (dalam Firdausijah dkk, 2023) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam

rangka mencapai tujuan yakni pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Guna mewujudkan tujuan organisasi publik, seorang manajer publik dapat mencari partner secara individu maupun instansi lain untuk membantu kelancaran berbagai macam pekerjaan yang akan dikerjakan oleh organisasi publik tersebut atau dengan kata lain dalam pelaksanaan manajemen publik diperlukan keterlibatan berbagai macam *stakeholders* (Keban, 2014).

Stakeholders merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh kegiatan maupun tujuan dari suatu organisasi (Freeman dalam Miles, 2012). Pentingnya keterlibatan *stakeholders* dalam pelaksanaan suatu kegiatan didukung oleh pendapat Sandy (2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan *stakeholders* diperlukan pada sebuah implementasi kebijakan guna membantu menangani berbagai masalah yang muncul agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Selaras dengan hal tersebut, Wang & Aenis (2019) serta Sari (2021) pun menyatakan bahwa timbulnya interaksi dan kolaborasi antar *stakeholders* dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan serta mengatasi berbagai macam permasalahan.

Analisis pengelompokan *stakeholders* diperlukan untuk mengetahui siapa saja pihak yang terlibat, peran,

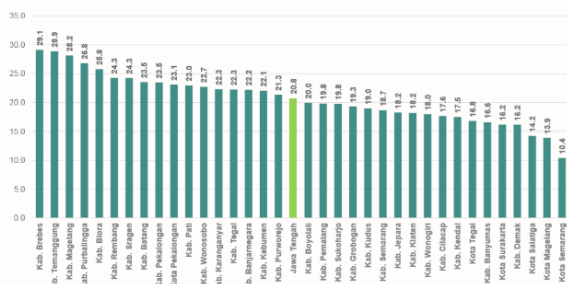
kepentingan, dan dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan suatu program (Widodo & Nugroho, 2021). Lebih lanjut, Masyurah dkk (2021) menyatakan bahwa *stakeholders* dikategorikan berperan baik apabila mereka telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, keberhasilan atas adanya keterlibatan dan peran dari berbagai *stakeholders* guna mengatasi masalah publik khususnya bidang kesehatan terlihat dalam penanganan masalah stunting pada salah satu daerah di Indonesia, yakni Kota Semarang.

Fenomena stunting di Indonesia diatasi dengan serius oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penetapan target penurunan angka prevalensi stunting nasional sebesar 14% yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 serta melibatkan peran dari berbagai macam *stakeholders*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017) menyatakan bahwa guna menindaklanjuti fenomena stunting di Indonesia, pemerintah pusat telah menentukan lima pilar pencegahan stunting yang terdiri dari (1) visi dan komitmen kepemimpinan; (2) kampanye dan komunikasi mengenai perubahan perilaku pada tingkat nasional; (3) konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pada tingkat pusat hingga desa; (4) ketahanan

pangan dan gizi; serta (5) monitoring dan evaluasi. Tidak hanya itu, strategi lain yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan menetapkan 12 provinsi prioritas dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting nasional.

Di antara 12 provinsi prioritas dalam program percepatan penurunan stunting di Indonesia, Jawa Tengah masuk sebagai salah satu daerah prioritas tersebut. Lebih lanjut, berikut merupakan capaian angka prevalensi stunting seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah (lihat Gambar-1).

PREVALENSI BALITA STUNTING (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH, SSGI 2022



Gambar 1 - Angka Prevalensi Balita Stunting Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Hasil SSGI, 2022

Sesuai data yang terdapat pada Gambar-1, terlihat bahwa daerah yang memiliki angka prevalensi balita stunting paling rendah di Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Pada tahun 2022, Kota Semarang memiliki capaian angka prevalensi balita stunting sebesar 10,4% yakni lebih rendah dari capaian angka prevalensi stunting Provinsi Jawa Tengah

dan berhasil mencapai angka yang lebih baik dari target nasional (kurang dari 14%).

Kota Semarang adalah salah satu daerah yang dapat dikategorikan berhasil dalam menurunkan angka prevalensi balita stunting pada tahun 2022. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan angka prevalensi stunting dalam empat tahun terakhir (lihat Tabel-1).

Tabel 1 – Angka Prevalensi Balita Stunting di Kota Semarang Tahun 2019-2022

Tahun	Persentase	Sumber
2019	25,3%	SSGI tahun 2019
2020	-	Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi
2021	21,3%	SSGI tahun 2021
2022	10,4%	SSGI tahun 2022

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023

Berdasarkan data pada Tabel-1, terlihat bahwa Kota Semarang terus mengalami penurunan angka prevalensi stunting yang semula mencapai angka 25,3% pada 2019 menjadi 10,4% pada 2022. Dasar dari upaya penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang. Pada beberapa peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua jenis

intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu intervensi spesifik dan sensitif.

Keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang dipengaruhi oleh adanya keterlibatan antar *stakeholders* terkait. Hal ini didukung oleh informasi yang berdasar dari laman resmi semarangkota.go.id (2023) dengan judul artikel “Ita Apresiasi Peran Kodim dalam Penanganan Stunting di Kota Semarang”, yang menjelaskan bahwa keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang tidak terlepas dari peran para *stakeholder* yang terlibat, baik dari pemerintah, organisasi perangkat daerah maupun lembaga kemasyarakatan terkait. Lebih lanjut, sebagaimana tertuang dalam tiga dasar peraturan penanganan stunting di Kota Semarang yang telah disebutkan sebelumnya, dijelaskan bahwa pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri dari berbagai *stakeholders* mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan diperlukan dan berfungsi untuk menciptakan koordinasi penyelenggaraan program percepatan penanganan stunting secara lebih optimal, termasuk Kota Semarang pun telah membentuk TPPS tersebut.

Keberhasilan Kota Semarang dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kota Semarang menarik untuk dianalisis lebih lanjut utamanya terkait dengan peran *stakeholders* yang terlibat. Berkaitan

dengan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung tentang pentingnya peran *stakeholders* khususnya dalam penanganan stunting. Penelitian yang dilakukan oleh Herlianti (2020), Lailia dkk (2021), dan Rosalia et al. (2022) memiliki kemiripan hasil analisis yang menyatakan bahwa keterlibatan berbagai macam *stakeholders* sangat diperlukan dalam program penanganan stunting di beberapa daerah. Lebih lanjut, berdasarkan analisis peran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dari upaya penanganan stunting tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan serta komitmen dari berbagai institusi lainnya.

Tidak hanya dilakukan pada bidang kesehatan, penelitian mengenai peran *stakeholders* juga dilakukan pada bidang kehidupan lainnya. Pada bidang lingkungan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisliatanto et al (2021) dan Subhan dkk (2022) menyatakan bahwa diperlukan peran *stakeholder* utama dalam pelaksanaan program maupun kebijakan pengelolaan sumber daya alam yakni pemerintah serta *stakeholder* pendukungnya berasal dari sektor privat, dan masyarakat. Tidak hanya itu, analisis terkait peran *stakeholder* juga dilakukan pada bidang pariwisata. Hasil penelitian oleh Lestari et al (2020), Destiana dkk

(2020), dan Hikmah dkk (2020) sepakat menyatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan kerja sama dan keterlibatan peran dari berbagai macam *stakeholders* untuk membantu pencapaian tujuan pariwisata yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai macam pernyataan dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keterlibatan, komitmen, dan dukungan dari setiap *stakeholder* yang terlibat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program maupun kebijakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan serta mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, analisis terkait peran *stakeholders* dalam implementasi program atau kebijakan penting dilakukan guna membantu memetakan peran setiap *stakeholder* sehingga dapat meminimalisasi adanya tumpang tindih tupoksi dan mereka dapat menjalankan perannya masing-masing secara lebih optimal.

Dengan demikian, berdasar pada berbagai uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan analisis mengenai peran *stakeholders* guna menjawab pertanyaan penelitian “**Bagaimana peran *stakeholders* dalam keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang?**”.

B. Rumusan Masalah

1. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.
2. Menganalisis peran *stakeholders* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang

D. Kajian Teori

Stakeholders

Studi mengenai *stakeholder* atau pemangku kepentingan berawal dari studi ilmu manajemen dan administrasi bisnis yang kemudian mengalami perkembangan serta diterapkan dalam kajian keilmuan yang lebih luas, contohnya dalam ilmu politik dan kebijakan publik (Brugha & Varvasovszky dalam Astuti dkk, 2020).

Reed (dalam Santoso dkk, 2015) mengemukakan bahwa *stakeholders* merupakan seseorang maupun kelompok yang membawa maupun terkena dampak dari suatu program atau kebijakan yang sedang berjalan.

Kategorisasi *Stakeholders*

Maryono et al. (dalam Yuniningsih & Suwitri, 2021; Hidayat dkk, 2020)

menjelaskan bahwa *stakeholder* dapat diidentifikasi ke dalam tiga kategori, yakni:

1. *Stakeholder* Primer, adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. Keberadaan dari *stakeholder* primer berguna sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Maryono (dalam Handayani & Warsono, 2017) pun menjelaskan bahwa *stakeholder* primer merupakan sekelompok orang yang mendapatkan dampak langsung dari pelaksanaan kebijakan publik, baik dampak positif maupun negatif.
2. *Stakeholder* Sekunder, merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. Meskipun demikian, *stakeholder* sekunder mempunyai rasa kepedulian yang besar pada pengembangan program. Tidak hanya itu, keberadaan *stakeholders* sekunder pun dikatakan cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
3. *Stakeholder* Kunci, adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan sekaligus kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan suatu kebijakan.

Peran Stakeholders

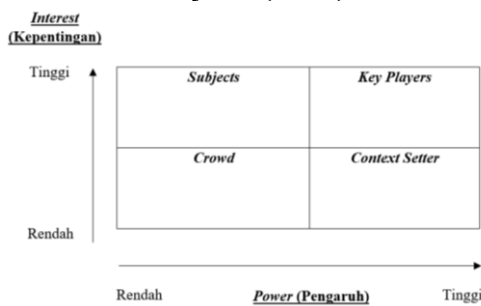
Peran *stakeholder* khususnya dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* (Thompson dalam Sandy, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, Bryson (2003) menjelaskan bahwa peran *stakeholder* dibagi menjadi empat kategori, yakni:

1. *Key Players* (Pemain Kunci), adalah *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh tinggi dalam kebijakan publik.
2. *Context Setter* (Pendukung), merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan rendah tetapi memiliki tingkat pengaruh tinggi dalam kebijakan publik.
3. *Subjects* (Subyek), merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi memiliki tingkat pengaruh rendah dalam kebijakan publik.
4. *Crowd* (Pengikut Lain), merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh rendah dalam kebijakan publik.

Menurut Eden & Ackermann (dalam Bryson, 2003; Nurfatriani dkk, 2015; Lailia, 2021), tingkat kepentingan dapat dilihat melalui beberapa aspek, yakni harapan maupun aspirasi *stakeholder* terhadap suatu kebijakan, manfaat yang

akan diperoleh *stakeholder* dari suatu kebijakan baik pada bidang ekonomi, sosial, maupun politik, dan upaya yang dilakukan *stakeholder* dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sementara itu, tingkat pengaruh *stakeholders* dapat dilihat melalui beberapa aspek, antara lain kemampuan mempengaruhi *stakeholders* baik secara personal maupun dengan kekuasaan yang dimiliki, wewenang dari tahap perencanaan hingga evaluasi yang dimiliki oleh *stakeholders*, dan kontribusi fasilitas (barang fisik maupun dana) yang diberikan *stakeholders* dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Matriks Analisis Peran Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Menurut Bryson (2003)



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian terletak di Kota Semarang. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* dan *snowball sampling*.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif serta sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,

dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tiga tahap yakni kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Terakhir, kualitas data dalam penelitian ini dibuktikan melalui uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi *Stakeholders* dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kota Semarang

1. *Stakeholder* Primer

Stakeholder primer yang terlibat dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang terdiri dari masyarakat, posyandu, dan puskesmas.

a. Masyarakat

Masyarakat termasuk dalam *stakeholder* primer karena memiliki kepentingan langsung sebagai sasaran program dan masukan yang mereka berikan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Lebih lanjut, masyarakat menerima dampak positif langsung berupa wawasan yang lebih luas mengenai cara penanganan dan pencegahan stunting dan perkembangan kesehatan yang baik khususnya bagi balita stunting.

b. Posyandu

Posyandu termasuk dalam *stakeholder* primer karena memiliki kepentingan sebagai pelaksana program penanganan stunting di wilayahnya masing-masing.

Sebagai pelaksana program di lapangan, posyandu merupakan pihak yang ikut berpengaruh dalam membantu mewujudkan keberhasilan implementasi program tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan Sholihah (2023) dan Mayditania (2023) yang mengemukakan bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh keterlibatan dan peran dari para pelaksana program maupun kebijakan.

Keberadaan posyandu diperhatikan oleh pemerintah dengan menjadikan aspirasi mereka sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Posyandu pun menerima dampak positif langsung yakni wawasan yang luas terkait penanganan dan pencegahan stunting serta rasa puas jika terdapat penurunan kasus stunting di wilayah kerjanya.

c. Puskesmas

Puskesmas termasuk dalam *stakeholder* primer karena memiliki kepentingan langsung sebagai pelaksana program turunan intervensi spesifik dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Meskipun tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, tetapi aspirasi puskesmas tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah. Aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Bappeda dan rapat rutin yang

diselenggarakan oleh DKK. Dampak positif yang diterima puskesmas dalam penurunan angka prevalensi stunting adalah dapat meningkatkan kinerjanya berkat dukungan adanya pemberian bantuan fasilitas dan dana penunjang yang diberikan oleh DKK.

2. Stakeholder Sekunder

Stakeholder sekunder dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang adalah pihak swasta. Pihak swasta termasuk dalam *stakeholder* sekunder karena hanya membantu mewujudkan keberhasilan program pemerintah melalui kegiatan koordinasi dan kerja sama melalui penyediaan bantuan (dana dan fasilitas penunjang) serta pelaksanaan program maupun kegiatan pendukung sedangkan SDM pelaksanaannya tetap disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, pihak swasta tidak berwenang dalam pengambilan keputusan, tetapi aspirasinya tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah melalui kegiatan *Focus Group Discussion*.

3. Stakeholder Kunci

Stakeholder kunci yang terlibat dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Para OPD tersebut termasuk dalam *stakeholder* kunci karena memiliki kepentingan dan kewenangan yang legal yang diatur dalam

peraturan yang berlaku yakni Pergub Jawa Tengah No. 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah serta Keputusan Walikota Semarang No. 050/468 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Semarang, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Bappeda Kota Semarang

Bappeda Kota Semarang memiliki kepentingan bertindak sebagai koordinator dari berbagai OPD dalam penanganan stunting di Kota Semarang dan berwenang dalam menginisiasi pembuatan kebijakan yang berupa RAD dan Peraturan Walikota terkait dengan penanganan masalah stunting. Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang berfungsi untuk menciptakan kerja sama antar *stakeholders* sehingga keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang dapat terwujud. Selaras dengan pernyataan tersebut, Handyaningrat (dalam Ginting, 2020) dan Bachtiar (2021) pun menyatakan bahwa fungsi dari pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh suatu organisasi adalah untuk menyatukan berbagai macam unit kerja organisasi sehingga mereka dapat bersinergi untuk melakukan kesamaan tindakan guna mewujudkan tujuan.

b. Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki kepentingan dalam menyusun dan

melaksanakan kegiatan intervensi spesifik dalam penanganan stunting serta melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan tersebut. Lebih lanjut, DKK memiliki wewenang dalam membantu pembuatan produk hukum berupa RAD dan Peraturan Walikota terkait dengan penanganan permasalahan stunting yang diinisiasi oleh Bappeda Kota Semarang.

c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Kepentingan yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adalah menangani keluarga berisiko stunting yang diwujudkan melalui kegiatan penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari program serta berwenang dalam penyusunan RAD dan pembuatan Perwal yang dikoordinasi oleh Bappeda Kota Semarang serta pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bidang administrasi pada penyelenggaraan TPPS Kota Semarang.

d. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang memiliki kepentingan dalam menjaga keamanan pangan bagi masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi atas program yang sedang berjalan serta berwenang dalam penyusunan RAD dan pembuatan Perwal terkait penanganan

stunting yang diinisiasi oleh Bappeda Kota Semarang.

B. Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kota Semarang

Matriks Analisis Peran *Stakeholder* dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kota Semarang

Interest
(Kepentingan)

Tinggi ↑ Rendah ↓	Subjects - Masyarakat - Posyandu - Puskesmas	Key Players - Bappeda Kota Semarang - Dinas Kesehatan Kota Semarang - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang
	Crowd Swasta (Tanoto Foundation, Angkasa Pura, PPJI)	Context Setter Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Rendah ← Power (Pengaruh) → Tinggi

Sumber: Data diolah penulis (2023)

1. *Key Players* (Pemain Kunci)

Key Players adalah *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

a. Bappeda Kota Semarang

Bappeda Kota Semarang termasuk dalam kategori peran *key players* karena memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang tinggi serta merupakan OPD yang berperan aktif sebagai koordinator dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

Tingkat kepentingan yang tinggi tercermin dari peran Bappeda Kota Semarang yakni bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan rutin yang bersifat koordinatif (rapat koordinasi antar OPD, *Focus Group Discussion* dan Rembug

Stunting), mengadakan rapat pembentukan produk kebijakan, serta menjadi penghubung dalam pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dengan swasta. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, Permanasari dkk (2020) serta Puspita & Harsono (2023) pun menyatakan bahwa Bappeda pada tingkat daerah memiliki peran penting yakni menjadi koordinator dari para *stakeholders* yang terlibat serta melaksanakan berbagai macam kegiatan koordinatif seperti Rembug Stunting dan perumusan RAD terkait dengan penanggulangan stunting.

Bappeda pun memiliki harapan bahwa penanganan stunting di Kota Semarang dapat terus berlanjut dengan dukungan dan komitmen dari para *stakeholders* terkait. Lebih lanjut, manfaat yang diterima oleh Bappeda dalam upaya penanganan stunting ini adalah penilaian kinerja yang baik karena berhasil mengkoordinasikan para OPD sehingga tidak terjadi penumpukan anggaran dan kesamaan kegiatan.

Tingkat pengaruh tinggi yang dimiliki Bappeda tercermin pada wewenang dalam pembuatan produk kebijakan, menyelenggarakan kegiatan koordinatif, dan membuat laporan pertanggungjawaban program penanganan stunting di Kota Semarang. Selanjutnya, Bappeda Kota Semarang juga berhasil mempengaruhi pihak pemerintah dan non pemerintah untuk dapat bekerja sama dalam

mewujudkan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang serta berperan dalam menyediakan kontribusi anggaran yang khusus digunakan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kajian.

b. Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan *stakeholder* yang termasuk dalam kategori peran *key players* karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi dengan berperan sebagai penanggung jawab intervensi pada sektor kesehatan dalam mewujudkan keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

Tingkat kepentingan tinggi yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Semarang terlihat dari berbagai upaya dan inovasi program yang dilakukan, yakni (1) pelaksanaan program PMT; (2) pemberian edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; (3) pelacakan balita gizi buruk; (4) pelaksanaan kegiatan AKSI BERGIZI bagi para remaja; (5) menyediakan *day care* Rumah Pelita (melibatkan peran dan kerja sama para OPD terkait pada tingkat kota) dan Rumah Sigap (melibatkan peran Pemkot Semarang dan Tanoto Foundation); serta (6) menghadirkan inovasi program CEMPAKA atau Cegah Stunting Bersama Pengusaha di Kota Semarang (melibatkan peran Pemkot Semarang dan PPJI). Upaya yang telah dilakukan tersebut pun telah membuahkan hasil positif yakni

tercapainya angka prevalensi stunting sebesar 10,4% pada tahun 2022. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki harapan yang besar agar upaya penurunan angka prevalensi stunting tersebut dapat terus berlanjut hingga dapat mencapai target menuju *zero* stunting. Terakhir, manfaat yang diterima Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah penilaian kinerja yang baik karena berhasil mencapai angka prevalensi stunting yang lebih baik dari target nasional.

Tingkat pengaruh tinggi tercermin pada wewenang yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, yakni mulai dari tahap perencanaan program (membuat produk hukum), tahap implementasi program (pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik), serta tahap monitoring dan evaluasi (pelaksanaan pertemuan rutin dengan Puskesmas se-Kota Semarang) untuk mengetahui laporan dari perkembangan program yang sedang berjalan. Dinas Kesehatan memiliki kekuasaan dan mampu mempengaruhi pihak lain (posyandu & puskesmas) untuk ikut serta dalam penanganan stunting. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan juga memberikan kontribusi fasilitas (obat-obatan, alat kesehatan, Rumah Gizi Pelangi) dan sumber daya anggaran yang ditujukan untuk pelaksanaan berbagai program dalam penanganan stunting di Kota Semarang.

c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang termasuk *stakeholder* yang berperan sebagai *key players* karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi dengan berperan aktif sebagai OPD penanggung jawab atas penanganan keluarga risiko stunting di Kota Semarang.

Tingkat kepentingan tinggi yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang tercermin dari pelaksanaan berbagai program penanganan keluarga berisiko stunting, yakni (1) pemberian stimulan makanan bergizi; (2) pelaksanaan kegiatan edukasi terkait dengan perubahan perilaku; (3) pemberian pendampingan bagi keluarga rawan stunting dan catin; (4) pelayanan KB gratis; serta (5) konseling dan pelatihan calon pengantin. Pelaksanaan berbagai program tersebut pun ternyata memberikan hasil yang positif yakni masyarakat menjadi lebih paham mengenai pencegahan stunting serta meningkatnya capaian pengguna KB Pasca Persalinan pada tiga tahun terakhir.

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB memiliki harapan bahwa kerja sama antar pihak dalam penanganan stunting ini akan terus terjalin meski target penurunan angka prevalensi stunting telah tercapai. Tidak hanya itu, partisipasi dan kemandirian masyarakat pun diharapkan dapat terus

meningkat. Manfaat yang diterima Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang atas keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting adalah penilaian kinerja organisasi yang baik sehingga dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Tingkat pengaruh tinggi tercermin dari wewenang yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, yakni berwenang dalam pembuatan produk hukum, melaksanakan program penanganan keluarga berisiko stunting, serta melakukan monitoring dan evaluasi melalui pengumpulan laporan atas pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting yang diserahkan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga). Dinas Pengendalian Penduduk dan KB juga mampu mempengaruhi pihak lain seperti kelurahan, kecamatan, TPK, dan masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program penanganan keluarga berisiko stunting. Terakhir, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB memberikan kontribusi berupa sumber daya anggaran yang dialokasikan khusus bagi penanganan keluarga berisiko stunting dan pemberian bantuan barang fisik secara gratis (stimulan makanan bergizi, obat alokon, kartu KB).

2. *Context Setters* (Pendukung)

Stakeholder yang berperan sebagai *context setter* dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang karena memiliki tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dengan berperan sebagai OPD Pendukung dalam menjaga urusan keamanan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang dikatakan memiliki tingkat kepentingan rendah karena hanya menjalankan upaya pendukung yakni menjaga keamanan pangan yang berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menekan timbulnya kasus stunting di Kota Semarang. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan edukasi dan pengawasan keamanan pangan secara rutin serta pelaksanaan Program Edukasi Pangan B2SA untuk Anak Usia Dini.

Meski hanya berperan sebagai OPD pendukung, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang memiliki harapan bahwa upaya penanganan stunting dan kerja sama yang terjadi akan terus berlanjut serta Dinas Ketahanan Pangan berkomitmen akan terus mendukung pelaksanaan upaya tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Selanjutnya, tidak ada manfaat khusus yang didapatkan Dinas Ketahanan Pangan selain penilaian kinerja organisasi yang baik atas keberhasilan pelaksanaan

program pendukung dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

Berbanding terbalik dengan tingkat kepentingan yang dimiliki, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tingkat pengaruh yang tinggi. Hal tersebut terlihat pada wewenang mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi dalam penanganan stunting di Kota Semarang. Dinas Ketahanan Pangan memiliki wewenang untuk ikut serta dalam pembuatan produk kebijakan yang diinisiasi oleh Bappeda Kota Semarang, melaksanakan program maupun kegiatan yang terkait dengan keamanan pangan, mengikuti rapat koordinasi bersama dengan para OPD terkait, dan melakukan rapat internal terkait dengan perkembangan program sebagai bahan evaluasi. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang juga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut serta dalam mencegah timbulnya kasus stunting. Terakhir, Dinas Ketahanan juga memberikan kontribusi anggaran yang dialokasikan khusus untuk urusan keamanan pangan guna mencegah stunting di Kota Semarang.

3. *Subjects* (Subyek)

Subjects merupakan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki tingkat pengaruh yang rendah dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

a. Masyarakat

Masyarakat termasuk *stakeholder* yang berperan sebagai *subjects* karena memiliki tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki tingkat pengaruh yang rendah dengan berperan sebagai penerima manfaat dalam pelaksanaan upaya penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

Tingkat kepentingan tinggi yang dimiliki masyarakat tercermin pada kedudukan masyarakat sebagai kelompok sasaran yang berperan untuk mendukung, menerima, dan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, masyarakat juga memiliki harapan yang tinggi agar penanganan stunting ini dapat terus berjalan. Masyarakat pun mendapatkan manfaat secara langsung dari pelaksanaan upaya penanganan stunting, yakni perkembangan kesehatan yang semakin baik serta wawasan yang lebih luas mengenai cara penanganan stunting yang baik.

Berbanding terbalik dengan tingkat kepentingan yang dimiliki, masyarakat memiliki tingkat pengaruh yang rendah karena tidak memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan dan tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain untuk ikut serta dalam mewujudkan keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Meskipun demikian, aspirasi masyarakat tetap digunakan oleh pemerintah sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

b. Posyandu

Posyandu termasuk pihak yang berperan sebagai *subjects* karena memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi memiliki tingkat pengaruh rendah dengan berperan sebagai pelaksana program turunan dari pemerintah dalam mendukung penanganan stunting di Kota Semarang.

Tingkat kepentingan tinggi yang dimiliki oleh posyandu terlihat dari kontribusi mereka dalam membantu pemerintah sebagai pelaksana program khususnya pada tingkat kelurahan masing-masing. Beberapa peran penting yang dilaksanakan oleh kader posyandu, yakni (1) melakukan operasi timbang balita di posyandu setiap bulan; (2) mendistribusikan PMT kepada balita stunting dan ibu hamil KEK sekaligus memantau perkembangannya; (3) memberikan edukasi penanganan stunting kepada masyarakat secara informal; (4) melakukan pendampingan dan pemantauan kesehatan kepada ibu hamil KEK bersama dengan TPK. Selain itu, posyandu juga bertugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang kemudian akan diserahkan kepada puskesmas.

Sejalan dengan penjelasan peran posyandu yang telah dipaparkan sebelumnya, keterlibatan kader posyandu

dalam mendukung penanganan stunting juga dijelaskan pada penelitian Wardah & Reynaldi (2022) serta Shiyam dkk (2022) yang menyatakan bahwa kader posyandu ikut terlibat dan memberikan perannya dalam mendukung program penanganan stunting di berbagai daerah.

Selanjutnya, posyandu juga memiliki harapan agar pelaksanaan penanganan stunting terus berlangsung serta didukung dengan peningkatan kemandirian masyarakat agar tidak terus bergantung terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Manfaat yang diperoleh kader posyandu dari pelaksanaan upaya penanganan stunting ini adalah peningkatan wawasan seputar penanganan stunting serta rasa puas atas penurunan kasus stunting dan perkembangan kesehatan masyarakat yang baik di wilayahnya masing-masing.

Posyandu memiliki tingkat pengaruh yang rendah karena tidak berwenang dalam penetapan kebijakan dan hanya dapat menyampaikan aspirasi yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan. Sebagai pelaksana program di lapangan, posyandu tidak dapat mempengaruhi pihak lain selain masyarakat untuk ikut terlibat dalam mewujudkan keberhasilan penanganan stunting di Kota Semarang.

c. Puskesmas

Puskesmas termasuk *stakeholder* yang berperan sebagai *subjects* karena memiliki

tingkat kepentingan tinggi tetapi memiliki tingkat pengaruh rendah dengan berperan penting sebagai pelaksana program turunan dari Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kota Semarang.

Tingkat kepentingan tinggi yang dimiliki terlihat dari kontribusi puskesmas dalam membantu pelaksanaan program maupun kegiatan intervensi spesifik pada penanganan stunting di Kota Semarang. Kegiatan intervensi spesifik yang dimaksud, yaitu (1) pemberian tablet tambah darah sekaligus edukasi kesehatan kepada para siswa SMP-SMA; (2) pemberian suntik TT dan kelas pelatihan bagi catin; (3) pelaksanaan kelas ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan secara terpadu; (4) pendampingan ibu nifas; (5) pemantauan kesehatan balita di posyandu secara rutin; serta (6) pemberian PMT bagi para balita stunting dan ibu hamil KEK.

Selain melaksanakan program maupun kegiatan penanganan stunting pada bidang kesehatan, puskesmas juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu terkait penanganan stunting serta mengikuti kegiatan koordinatif dan memberikan laporan pertanggungjawaban program kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selanjutnya, puskesmas memiliki harapan yang besar agar pelaksanaan penanganan stunting di Kota Semarang dapat terus berjalan hingga target menuju *zero* stunting dapat tercapai. Kemudian, manfaat yang

diterima puskesmas dari penurunan angka prevalensi stunting adalah penilaian kinerja yang baik atas perwujudan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.

Meskipun memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, sayangnya tingkat pengaruh yang dimiliki oleh puskesmas tergolong rendah. Puskesmas tidak memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan karena hanya bertindak sebagai pelaksana program saja. Namun, mereka memiliki wewenang untuk memberikan masukan yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Selanjutnya, puskesmas tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi OPD yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan hanya dapat mempengaruhi posyandu serta masyarakat untuk ikut terlibat dalam mewujudkan keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang. Terakhir, puskesmas tidak berkontribusi dalam menyediakan fasilitas maupun dana pendukung dalam penanganan stunting karena kedua hal tersebut telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.

4. *Crowd* (Pengikut Lain)

Stakeholder yang berperan sebagai *crowd* adalah pihak swasta yang terdiri dari Tanoto Foundation, Angkasa Pura, dan para pengusaha yang tergabung dalam PPJI atau Perkumpulan Penyelenggara Jas Boga

Indonesia. Pihak swasta termasuk dalam *stakeholder* yang berperan sebagai *crowd* karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah dengan berperan sebagai pihak pendukung di balik layar dalam penanganan stunting di Kota Semarang.

Tingkat kepentingan rendah terlihat pada keterlibatan pihak swasta yang bersifat tidak langsung. Pihak swasta hanya melakukan kerja sama dengan memberikan bantuan berupa barang fisik, dana, maupun kegiatan pendukung guna membantu mewujudkan keberhasilan program utama pemerintah dalam penanganan stunting. Pihak swasta dapat dikatakan sebagai pihak dibalik layar dalam penanganan stunting karena SDM pelaksana kegiatan pendukung tersebut pun tetap disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Lebih detail, contoh kerja sama yang telah terlaksana dalam penanganan stunting di Kota Semarang, yakni (1) pemberian bantuan oleh PPJI berupa 480 PMT per hari bagi balita stunting dan ibu hamil KEK; (2) pemberian bantuan paket PMT bagi balita stunting dan ibu hamil KEK oleh Angkasa Pura; (3) kerja sama antara Tanoto Foundation bersama dengan Dinas Kesehatan terkait pemberian pendampingan penanganan stunting bagi masyarakat, serta (4) kerja sama pendirian Rumah Sigap oleh Tanoto Foundation dan Pemkot Semarang.

Dengan adanya kontribusi dalam pemberian bantuan yang telah diberikan, terlihat bahwa pihak swasta memiliki harapan yang tinggi agar penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang dapat terwujud. Pihak swasta tidak berharap mendapatkan timbal balik atau manfaat atas pelaksanaan kegiatan tersebut, karena bantuan yang mereka berikan pun hanya sebatas menjalankan program CSR dari perusahaan masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Sejalan dengan tingkat kepentingan yang dimiliki, pihak swasta pun memiliki tingkat pengaruh rendah yang terlihat pada tidak adanya wewenang dalam pembuatan kebijakan. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan aspirasinya melalui kegiatan koordinatif yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pihak swasta juga tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain dalam kegiatan penanganan stunting karena posisi mereka hanya sebagai pihak di balik layar dalam memberikan bantuan maupun kegiatan pendukung program pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. *Stakeholders* yang terlibat dalam keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang teridentifikasi menjadi 3 kategori, yakni (1) *Stakeholder primer*, terdiri dari masyarakat sasaran, posyandu,

puskesmas; (2) *Stakeholder* sekunder, terdiri dari pihak swasta (Tanoto Foundation, Angkasa Pura, PPJI); (3) *Stakeholder* kunci, terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang. Selanjutnya, meski Kota Semarang telah dikategorikan berhasil dalam menangani permasalahan stunting, ternyata masih ditemukan masalah pada *stakeholder* masyarakat yakni kurangnya kemandirian dalam pemenuhan gizi keluarga.

2. Peran *stakeholders* berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh dalam penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang terbagi menjadi 4 jenis, yakni:

1) *Key players*, terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang. *Key players* merupakan peran yang paling berpengaruh dalam mewujudkan keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.;

2) *Context setters*, yakni Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Meskipun memiliki kepentingan yang rendah, peran dengan jenis ini tetap mendukung keberhasilan

penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang;

- 3) *Subjects*, terdiri dari masyarakat sasaran, posyandu, dan puskesmas. Kategori peran *subjects* dikatakan berpengaruh dalam membantu keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting karena tingkat kepentingan tinggi yang dimiliki;
- 4) *Crowd* yakni pihak swasta yang terdiri dari Tanoto Foundation, Angkasa Pura, dan para pengusaha PPI. Kategori ini merupakan peran yang paling rendah pengaruhnya tetapi tetap membantu dalam mewujudkan keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang.

Lebih lanjut, keberhasilan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Semarang juga didukung oleh kerja sama dan peran lintas sektor dalam pelaksanaan inovasi program penanganan stunting. Inovasi program yang dimaksud, yakni Program Cempaka (Cegah Stunting Bersama Pengusaha di Kota Semarang), *Day Care* Rumah Pelita dan Rumah Sigap.

Saran

1. Pemerintah Kota Semarang bersama seluruh *stakeholders* terkait perlu untuk memfokuskan penanganan stunting dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat karena

selama ini hanya berfokus pada pemberian bantuan dan penyuluhan saja. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dapat berbentuk pelatihan rutin terkait cara pemenuhan gizi keluarga yang seimbang setiap satu bulan sekali.

2. Inovasi program yang melibatkan kerja sama dan peran lintas sektor milik Pemerintah Kota Semarang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lain sebagai upaya percontohan dalam membantu penanganan stunting di daerah masing-masing. Inovasi program lintas sektor yang dapat digunakan daerah lain, yakni Program CEMPAKA, *Day Care* Rumah Pelita dan Rumah Sigap.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Retno Sunu, Hardi Wasono, dan Abd. Rachim. (2020) *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Bachtiar, B. (2021). Fungsi Koordinasi Bappeda dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 12(1), 22-32.
- Bryson. (2003). *What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubbert H. Humphrey Institute of Public Affairs.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat

- Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurohim, A., Sunariyanto, S., Fauzan, R., Sagena, U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Ginting, D. B. (2020). *Pengaruh Pengawasan dan Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Tenaga Kerja Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Gubernur Jawa Tengah. (2019). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah*.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40-53.
- Herlianti, L. (2022). Collaboration of Actors in The Network in Stunting Prevention Programs in Bulukumba District. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2021-2026.
- Hidayat, N. C., Setijanigrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember:(Studi Kasus di Desa Tugusari Kabupaten Jember). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188-201.
- Hikmah, N., Larasati, E., Purnaweni, H., & Yuniningsih, T. (2020). Identification and Role of Stakeholders in Ecotourism Development in Indonesia. In *6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)* (pp. 257-262). Atlantis Press.
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. <http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2022/>. Diakses pada 16 Maret 2023.
- Lailia, I., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 194-207.
- Lestari, A. W., Suwitri, S., Larasati, E., & Warsono, H. (2020). Actor Network in Tourism Management Based on Sustainable Development (Case Study of Tourism Development in Batu City, Indonesia). *Management and entrepreneurship: trends of development*, 3(13), 8-15.
- Masyhurah dkk. (2021). Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 249-260.
- Mayditanian, C. (2023). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Tuberkulosis Pada Puskesmas Di Indonesia: Literature Review. *Journals of Ners Community*, 13(1), 55-64.
- Miles, Jeffrey Allen. (2012). *Management and Organization Theory*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau. *Forestry Research, Development and Innovation Agency*.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*.
- Pemerintah Kota Semarang. (2022). *Peraturan Walikota Semarang Nomor*

- 27 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang. (2023). *Ita Apresiasi Peran Kodim dalam Penanganan Stunting di Kota Semarang*.
<https://semarangkota.go.id/p/4450/ita-apresiasi-peran-kodim-dalam-penananganan-stunting-di-kota-semarang>.
 Diakses pada 16 Maret 2023.
- Permanasari, Y., dkk. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4).
- Puspita, N. L., & Harsono, D. (2023). Stakeholder Analysis Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(2), 14.
- Rosalia, F., Kartika, T., & Wulandari, J. (2022, January). Actor's Network of Stunting Prevention Program in Bandar Lampung City, Lampung, Indonesia. In *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)* (pp. 128-138). Atlantis Press.
- Sandy, O. F. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3), 415-422.
- Santoso, H., Harini Muntasib, E. K. ., Kartodihardjo, H., & Soekmadi, R. (2015). Peranan Dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 197-211.
- Sari, Y. R. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2).
- Shiyam, R. L., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2022). Pencegahan Stunting Melalui Program Gemarikan oleh Posyandu di Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 126-137.
- Sholihah, A. R. (2023). *Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Subhan, M., Zulkarnaini, Z., Meiwanda, G., & Putri, R. A. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439-454.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta Pusat: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Trisliantanto, D., Adib, M., Rustinsyah, R., Kurniasih, D., Wijoyo, S., & Pandin, M. G. R. (2021). Stakeholder Networking Analysis on Umbulan Water Supply Project: An Exploratory Study Combined with Meta-Analysis Identification Design. *Preprints.org*.
- Walikota Semarang. (2022). *Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/468 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Semarang*.
- Wang, J., & Aenis, T. (2019). Stakeholder Analysis in Support of Sustainable Land Management: Experiences From Southwest China. *Journal of Environmental Management*, 243, 1-11.
- Wardah, R., & Reynaldi, F. (2022). Peran Posyandu Dalam Menangani Stunting di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Biology Education*, 10(1), 65-77.
- Widodo, E. S., & Nugroho, K. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana: Studi Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 7(1).
- Yuniningsih, Tri., & Sri Suwitri. (2021). *Teori dan Konsep Jejaring*.